**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Isu di Indonesia saat ini semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir mengenai akuntabilitas keuangan publik. Hal tersebut disebabkan oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan yang signifikan dalam pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah, pada dasarnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparansi baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintah pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah daerah harus dapat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, selain itu pemerintah harus menyajikan informasi laporan keuangan secara jelas. Informasi mengenai penyajian laporan keuangan yang utuh akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. “Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah” (Nordiawan dan Hertianti, 2010; Charly, 2015).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan melalui media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan website. Informasi yang didapat harus memenuhi prinsip tansparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilan pemerintah sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. “Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat” (Halim, 2013:126).

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. “Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah mengandung informasi yang menggambarkan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode yang dilaporkan tiap tahun. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat ukur kinerja bagi penggunaannya” (Saputra, 2012).

Penggunaan informasi keuangan sangat membutuhkan informasi mengenai keuangan daerah, dengan adanya informasi keuangan daerah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah maka akan menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas. Untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur danterbuka kepada publik karena kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan amanat atau tanggung jawab kepada masyarakat. Hal ini senada dengan teori keagenan yang diungkapkan oleh Anthony dan Vijay (2005) bahwa “Pemerintah memiliki hubungan atau kontrak terhadap masyarakat. Hubungan atau kontrak tersebut dapat berupa tanggungjawab yang diamanahkan oleh masyarakat kepada pemerintahan untuk menjalankan roda pemerintahaan dengan baik. oleh karena itu sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah harus menyediakan infomasi keuangan melalui laporan keuangan”, sehingga masyarakatdapat menilai kinerja pemerintahan. Salah satu alat untuk menfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Para penggunaan laporan keuangan baik pihak eksternal maupun pihak internal diharapkan dapat memahami dan mengerti informasi yang disajikan dalam. Oleh karena itu, untuk memuaskan para penggunaan informasi sangat perlu dilakukan upaya untuk menggali informasi apasaja yang dibutuhkan oleh penggunaan informasi keuangan daerah. “Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah yangberisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah daerah”  
(Bandariy, 2011).

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu entitas pelaporan yang diwajibkan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah “Banyak keluhan di kalangan akademisi mengenai kesulitan mendapatkan akses terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), opini yang menyatakan pemerintah daerah tidak perlu mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum karena legislatif telah menggantikannya, banyak pemda yang masih enggan menyediakan informasi publik dan mirisnya banyak di antara laman resmi pemerintah daerah yang sudah sekian lama tidak di *update* dan ditakutkan infomasi laporan keuangan disalahgunakan kelompok penggunaan sebagai senjata untuk menjatuhkan orang-otang di pemerintah daerah” (Dewantara, 2018).

Penelitian ini dilatar belakangi karena dua hal yaitu pertama karena adanya  
perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penelitian tersebut yaitu: dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh  
Rohman (2009), hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penyajian laporan keungan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Bandariy (2012), hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk diteliti mengingat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan secara lengkap dan mudahdiakses oleh publik, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji**“Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empirispada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)”**.

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara parsial terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan?

**1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam menganalisis, maka penulis memberikan batasan penelitian menggunakan variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penggunaan informasi keuangan daerah. Metode survei dalam penelitian dengan cara menyebar kuesioner ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018.

**1.4 Tujuan Dan ManfaatPenelitian**

**1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan daerah secara parsial terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

**1.4.2 ManfaatPenelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan penggunaan informasi keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai informasi dalam hal penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan informasi keuangan daerah.
3. Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai penggunaan informasi keuangan daerah, penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penyajian laporan keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.